

Klaudia Alvionita Herlina Putri

NPM: 190442010113

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Klaudia Alvionita Herlina Putri

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: Putryklaudia199@gmail.com

Abstrack

Corruption crimes not only harm state finances and unsettle the community, but also violate the social rights of the community, especially in the process of development and management of national resources. So this raises the problem raised by the author: 1) What is the role of the Attorney General's Intelligence in handling allegations of corruption at the Manggarai District Attorney's Office, East Nusa Tenggara Province? and 2) What are the factors that influence the intelligence of the Manggarai District Attorney in East Nusa Tenggara Province in handling corruption? The types and sources of data obtained are through interviews as primary data and supported by secondary data from books, laws and regulations and others. This research method uses qualitative research, a type of empirical juridical research. The data obtained was then analyzed using qualitative data analysis which was presented descriptively, namely explaining, describing and describing clearly and concretely the objects discussed so that answers were obtained that were in accordance with the problems that were closely related to this research. Based on the analysis of the data, the following research results were obtained: (1) The intelligence of the Manggarai District Attorney's Office of East Nusa Tenggara Province in handling corruption cases in general has 3 roles, namely the first, in terms of investigating cases of alleged corruption by the intelligence of the Manggarai District Attorney's Office in order to obtain information and information material to proceed with the investigation process by the special criminal section. Second, namely prevention of criminal acts of corruption by forming a Regional Government and Development Guard and Security Team (TP4D) based on an Attorney General's Order and Third, searching for fugitives from the prosecutor's office or court. (4) the inhibiting factors experienced by the Manggarai District Attorney's Intelligence in handling corruption cases, namely, firstly the lack of human resources, secondly the calling of witnesses, thirdly the collection of evidence, and fourthly the fear of the party being questioned about the intervention of related agencies, and (3) The first supporting factor is the participation of the public and the media, second is the existence of an intelligence network that can facilitate the gathering of information and evidence related to alleged acts of corruption. While efforts to overcome this are by adding personnel in handling, extending the time in the process of calling witnesses and

collecting evidence related to cases, as well as by providing guarantees and protection for the party being questioned for interventions carried out by related agencies.

Keywords: *Prosecutor Intelligence, Handling Corruption Crimes*

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan meresahkan masyarakat, tetapi juga melanggar hak-hak sosial masyarakat khususnya dalam proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya nasional. Sehingga hal ini menimbulkan masalah yang diangkat oleh penulis: 1) Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur? dan 2) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan tindak pidana korupsi?. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah melalui wawancara sebagai data primer dan didukung dengan data sekunder yang berasal dari buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yuridis empiris. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas sehingga didapat jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu pencegahan perkara tindak pidana korupsi dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung dan Ketiga pencarian buronan kejaksaan atau pengaduan. (4) faktor penghambat yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama Kurangnya SDM, Kedua pemanggilan saksi, ketiga pengumpulan alat bukti, dan keempat adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait, dan (3) Faktor pendukung pertama peran serta dari masyarakat dan media, kedua adanya jaringan intelijen yang dapat mempermudah dalam mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan penambahan personil dalam penanganan, perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

Kata Kunci: *Intelijen Kejaksaan, Penanganan Tindak Pidana Korupsi*